

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan organisasi sektor publik yang semakin meningkat menuntut pemerintah dalam menjalankan fungsinya dalam hal pelayanan kepada publik yang merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada publik harus dilaksanakan dengan baik. Pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan melalui pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah suatu bentuk pelimpahan wewenang yang diberikan kepada suatu daerah untuk mengelola urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai kepentingan dan kebutuhan lokalnya, dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong upaya pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan peran masyarakat.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya dapat dinilai dari keseluruhan capaian kinerja yang telah dicapai, termasuk pelayanan publik yang diberikan untuk masyarakat. Pemerintah daerah yang baik harus memiliki layanan publik yang berkualitas, hal ini menunjukkan suatu bentuk kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kinerja pemerintah sangat penting dalam melaksanakan pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Kinerja adalah akibat dari pelaksanaan suatu tindakan yang mengarah pada tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi. Sujarweni (2020) menjelaskan bahwa kinerja mencakup hasil yang dicapai, prosedur yang diikuti, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Sehingga, manajemen kinerja yang baik menjadi sangat penting dalam mencapai keberhasilan organisasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dimana pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan baik untuk memenuhi

kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pelayanan kepada publik merupakan bentuk kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai terkait dengan transaksi keuangan (Rusdiana dan Nasihudin, 2018). Kinerja keuangan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dibuat pada tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan. Pelaporan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi guna mencapai manajemen pemerintahan yang baik dan memenuhi tujuan pemerintah dan masyarakat.

Transparansi pelaporan keuangan merupakan faktor yang memengaruhi kinerja keuangan. Transparansi dalam pemerintahan mengacu pada keterbukaan atau kejelasan dalam menyusun kebijakan, termasuk kebijakan keuangan yang bisa diawasi dan diketahui oleh lembaga legislatif maupun masyarakat umum (Haryanto dkk., 2007). Masyarakat dapat mengetahui kebijakan dan rencana kerja pemerintah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan melalui transparansi. Prinsip transparansi yang tidak diterapkan dalam sebuah sistem pemerintahan mengakibatkan terjadinya ketidakefisien dalam alokasi sumber daya yang ada, sehingga dapat terjadi kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat. Transparansi pelaporan keuangan harus dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat agar mudah dipahami dan dapat diakses oleh publik. Hasil penelitian Elkha dan Wahidawati (2020) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pencapaian kinerja keuangan yang baik juga memerlukan sebuah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap jalannya program kegiatan yang dilakukan. Pengawasan ini dapat membantu proses mengimplementasi transparansi. Sistem pengendalian internal dapat mendukung pelaksanaan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan. Sistem pengendalian internal memberikan kepastian bahwa program yang dilaksanakan berjalan selaras dengan rencana dan target yang telah ditentukan, serta meminimalkan risiko terjadinya kesalahan, kecurangan, atau kerugian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pemerintah harus mampu mengatur dan menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh

untuk meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian Damayanti dan Hermanto (2018) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Penelitian Sukma (2021) juga menunjukkan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pusat pengelolaan keuangan dan aset daerah di tingkat pemerintah daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). BPKAD bertanggung jawab untuk memerintahkan, mengamati, menilai dan mengungkap, serta memberikan arahan khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, serta kas daerah dan aset daerah. Salah satunya yaitu BPKAD Kabupaten Bondowoso. Pemerintah yang mampu melayani kepentingan masyarakat dapat diwujudkan dengan melaksanakan kinerjanya dengan baik. BPKAD Kabupaten Bondowoso harus mampu menghasilkan kinerja yang baik, sehingga diperlukan sistem pengendalian internal yang dapat diimplementasikan di BPKAD Kabupaten Bondowoso untuk mendukung transparansi pelaporan keuangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso mengembalikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2020. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian pada pelaksanaan APBD 2020. Pengembalian LKPj ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memajemen pemerintahannya dalam bidang penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dapat diartikan bahwa pemerintah belum memiliki kinerja yang baik. BPKAD Kabupaten Bondowoso memegang peran yang sangat penting, namun dalam menjalankan fungsinya masih belum optimal. Hal ini dikatakan oleh Direktur LSM Jack Centre Jatim, Agus Sugiarto mengatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso untuk lebih fokus memperhatikan manajemen pemerintahan di Kabupaten Bondowoso juga masih diperlukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso, termasuk BPKAD. Pada temuan BPK tahun anggaran 2020 menunjukkan kurang mampu BPKAD Bondowoso mengatur keuangan daerah, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan di masing-masing OPD (Petisi.co, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang sebanding dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan objek yang berbeda, berdasarkan uraian masalah dan penelitian sebelumnya. Objek pada penelitian ini yaitu BPKAD Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini mengikutsertakan transparansi pelaporan keuangan, dan sistem pengendalian internal dalam memengaruhi kinerja keuangan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan BPKAD Kabupaten Bondowoso”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah transparansi pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Bondowoso ?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Bondowoso ?

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan pengaruh transparansi pelaporan keuangan terhadap kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk menjelaskan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Bondowoso.

## **1.4 Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi BPKAD, terkait hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperbaiki kinerja keuangan untuk memenuhi harapan dan keinginan publik.
2. Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Jember serta diharapkan dapat menambah

wawasan dan pengalaman mengenai faktor yang memengaruhi kinerja keuangan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.